

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI: ANALISIS STRATEGI, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INTEGRITAS

Jodie Firmansyah Nur
Universitas Bandar Lampung
Email: jodiefirmansyahnur@gmail.com

Abstract

Corruption in Indonesia has reached an alarming level and is considered an extraordinary crime that requires extraordinary measures to address it. University students, as agents of change, hold a strategic position in corruption prevention efforts through anti-corruption education, social movements, and the internalization of integrity values. This study aims to examine strategies for integrity education, the challenges faced by students in anti-corruption movements, and how anti-corruption education can be implemented through local wisdom approaches and technology in the digital era 4.0. The research employs a literature review method based on three primary sources: a book on anti-corruption education rooted in local wisdom, a scientific journal on strategies for building integrity, and a book discussing the role of students in anti-corruption movements. The findings indicate that effective anti-corruption education must be contextual, participatory, culturally grounded, and supported by institutional role models. Major challenges include permissive cultural attitudes, weak institutional morality, and digital-era complexities. Students possess significant capacity in conducting anti-corruption campaigns, policy advocacy, social monitoring, and fostering a culture of integrity within universities. The study concludes that collaboration among universities, communities, and government institutions is essential for building a sustainable anti-corruption ecosystem.

Keywords: Students, Corruption, Anti-Corruption Education, Integrity, Local Wisdom, Pi'il Pesenggiri, Digital Era.

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah penanganan luar biasa. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, gerakan sosial, serta internalisasi nilai integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pendidikan integritas, tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi, serta bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal dan teknologi pada era digital 4.0. Metode penelitian menggunakan studi literatur terhadap tiga sumber utama: buku pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal, jurnal ilmiah mengenai strategi pembentukan integritas, serta buku mengenai peran mahasiswa dalam gerakan

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 474

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif harus bersifat kontekstual, partisipatif, berbasis budaya lokal, serta didukung keteladanan institusional. Tantangan utama mencakup budaya permisif, lemahnya moral institusi, dan tantangan digital. Mahasiswa memiliki kapasitas signifikan dalam kampanye antikorupsi, advokasi kebijakan, pengawasan sosial, dan pembentukan budaya integritas di lingkungan kampus. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Mahasiswa, Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Integritas, Kearifan Lokal, Pi'il Pesengiri, Era Digital.

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling mendasar dan kompleks dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial secara luas. Dampak yang ditimbulkan tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh berbagai lapisan kehidupan masyarakat, mulai dari meningkatnya kemiskinan struktural, ketidakmerataan pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Korupsi juga berkontribusi besar terhadap stagnasi pembangunan nasional, karena anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik justru bocor akibat penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan temuan Zainudin Hasan dalam Jurnal Perkara yang menegaskan bahwa : “Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berfikir masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam buku Pendidikan Anti Korupsi Era 4.0, korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks: dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja—baik oleh individu, kelompok, maupun jaringan yang bekerja secara sistematis. Bahkan, aktivitas korupsi sering dilakukan tanpa rasa bersalah karena dianggap sudah menjadi praktik lumrah dalam birokrasi maupun kehidupan sosial sehari-hari. Dalam konteks tertentu, korupsi bahkan dipandang sebagai sesuatu yang normal, bagian dari “aturan tak tertulis” dalam menjalankan urusan pemerintahan atau bisnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya dan moral.

Berbagai laporan dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa tindakan korupsi telah mengakar kuat dalam struktur sosial Indonesia. Faktor utamanya adalah budaya permisif yang berkembang di masyarakat, lemahnya sanksi moral, serta rendahnya integritas sebagian aparaturnegara yang memiliki kewenangan publik. Hasan (2024) menegaskan bahwa korupsi di Indonesia “telah terjerumus dalam kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup masyarakat,” sehingga diperlukan pembenahan bukan hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek pendidikan dan pembentukan karakter.

Di tengah kondisi tersebut, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki kemampuan etis untuk menghadapi tantangan zaman. Laporan KPK (2020) juga menekankan

pentingnya partisipasi publik, termasuk mahasiswa, sebagai unsur penting dalam mendorong tata kelola yang bersih. Menurut Suyatno (2019), internalisasi integritas di perguruan tinggi membutuhkan dukungan budaya akademik dan keteladanan moral dari dosen sebagai figur teladan.

Oleh karena itu, mahasiswa menempati posisi yang sangat penting dalam gerakan antikorupsi. Mereka bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi masyarakat melalui pemikiran kritis, keterlibatan sosial, serta keberanian moral. Widoyoko (2016) menyatakan bahwa keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, sangat menentukan keberhasilan gerakan antikorupsi karena mereka memiliki idealisme yang kuat serta kemampuan analitis yang kritis dalam memahami persoalan publik. Muttaqin (2018) menegaskan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki kapasitas besar untuk menggerakkan masyarakat dalam isu integritas dan antikorupsi.

Namun demikian, pendidikan antikorupsi tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan normatif semata yang hanya menekankan pada aspek hukum dan aturan. Pengetahuan tentang undang-undang tidak cukup untuk membentuk perilaku antikorupsi jika tidak diikuti dengan internalisasi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana mahasiswa dapat memainkan peran sentral dalam gerakan antikorupsi melalui strategi pendidikan yang tepat, internalisasi nilai integritas, serta pendekatan berbasis budaya yang bersifat kontekstual. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat dibangun model pendidikan antikorupsi yang lebih efektif, relevan, dan mampu menghasilkan generasi muda berintegritas tinggi yang siap menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), sebagai pendekatan utama untuk mengkaji peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi melalui analisis strategi, tantangan, dan implementasi pendidikan integritas. Metode ini dipilih karena relevan untuk menganalisis konsep-konsep teoretis, data empiris, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pendidikan antikorupsi, pembentukan karakter, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam menanamkan nilai integritas.

Setelah proses pengumpulan data, peneliti melakukan analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah secara mendalam berbagai gagasan, teori, dan temuan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema-tema penting yang berhubungan dengan strategi pendidikan integritas, tantangan gerakan antikorupsi, peran mahasiswa dalam pembangunan karakter bangsa, serta implementasi nilai budaya lokal dalam pendidikan antikorupsi. Teknik ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna substantif dari teks secara sistematis sehingga dapat menyusun pemahaman yang utuh dan mendalam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda, terutama mahasiswa, sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan moral dan kapasitas intelektual untuk mendorong pemberantasan korupsi. Kemendikbud (2019) menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter di perguruan tinggi melalui keteladanan akademik, budaya organisasi yang berintegritas, dan kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada nilai kejujuran serta tanggung jawab sosial.

Jurnal Perkara menegaskan bahwa pendidikan humanistik dan pendidikan antikorupsi “memegang peran penting dalam membentuk karakter dan sikap positif generasi muda”. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen penanaman nilai moral, pembentukan integritas, dan penguatan kesadaran etis pada mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi, nilai integritas harus dibangun secara sistematis melalui kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya akademik yang mendukung perilaku jujur dan bertanggung jawab.

korupsi di Indonesia memiliki akar sosial dan budaya yang kuat. Zainudin Hasan menjelaskan secara tegas bahwa “korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berfikir masyarakat”. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi telah menjadi praktik sosial yang dilegitimasi oleh sebagian norma masyarakat. Bahkan, Hasan menambahkan bahwa “faktor-faktor yang mendorong korupsi dan perilaku tidak etis sering kali terkait dengan adanya norma-norma sosial yang memperbolehkan atau bahkan mendorong praktik-praktik tersebut”. Realitas ini menghadirkan tantangan serius bagi pendidikan antikorupsi, sebab upaya pencegahan tidak hanya menyasar pengetahuan hukum, tetapi harus mengubah cara pandang dan budaya masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam konteks peran mahasiswa, buku Pendidikan Anti Korupsi Era 4.0 menegaskan bahwa mahasiswa memiliki kontribusi strategis dalam mendorong gerakan antikorupsi melalui kampanye, literasi digital, serta pengawasan sosial. Buku tersebut menyoroti bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang mampu memengaruhi opini publik dan mendorong transparansi di masyarakat. Peran mahasiswa ini menjadi sangat penting, terutama di era digital di mana penyebaran informasi dapat menjadi alat efektif untuk mendorong kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Berikut strategi, tantangan, implementasi Pendidikan integritas serta peran mahasiswa :

a. Strategi Pendidikan Integritas

Pendidikan menjadi salah satu pendekatan paling efektif dan ekonomis dalam upaya pencegahan korupsi. Buku Pendidikan Anti Korupsi Era 4.0 menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dua jalur: penindakan dan pencegahan. Jalur pencegahan dinilai lebih ekonomis dan berjangka panjang, termasuk melalui pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Strategi efektif mencakup:

1. Integrasi mata kuliah antikorupsi.
2. Pembiasaan perilaku jujur di kampus.
3. Keteladanan dosen dan pimpinan.
4. Pengawasan lingkungan kampus.
5. Penguatan literasi digital untuk membendung informasi hoaks terkait korupsi.

Menurut jurnal Perkara (2024), pendidikan humanistik dan antikorupsi berperan penting dalam membentuk sikap positif generasi muda, terutama pada konteks perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi cara pikir dan perilaku mahasiswa.

b. Tantangan Gerakan Antikorupsi

Beberapa tantangan besar diidentifikasi, di antaranya:

1. Budaya permisif terhadap korupsi, yang bahkan dianggap wajar dalam kehidupan birokrasi dan pemerintahan.

Menurut BPHN (2018), salah satu akar korupsi di Indonesia adalah lemahnya integritas individu dan budaya permisif yang berkembang dalam birokrasi, sehingga pendidikan integritas harus diperkuat untuk membentuk karakter masyarakat yang antikorupsi.

2. Moralitas aparaturnya yang lemah, yang menormalisasi tindakan koruptif.
3. Era digital, yang mempercepat penyebaran informasi tetapi juga memperbanyak peluang kriminalitas dan manipulasi data.
4. Kurangnya keteladanan pejabat publik, yang memperburuk kepercayaan masyarakat dan membuat pendidikan antikorupsi sulit diterapkan secara konsisten.

Jurnal Perkara (2024) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pembentukan karakter mahasiswa. Teknologi memiliki dua sisi: mendukung kampanye antikorupsi, namun juga membuka peluang tindakan manipulatif, hoaks, dan normalisasi perilaku menyimpang. Tantangan ini menuntut mahasiswa untuk memiliki literasi digital etis.

c. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal

Nilai Pi'il Pesenggiri berperan penting dalam membentuk integritas moral. Nilai-nilai seperti *juluk adok* (harga diri), *nemui nyimah* (keramahmatan), dan *sakai sambaian* (gotong royong) menjadi dasar perilaku antikorupsi karena mengajarkan rasa malu terhadap perilaku menyimpang dan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan Masyarakat. Implementasi kearifan lokal dapat dilakukan melalui:

1. Integrasi nilai budaya dalam mata kuliah.
2. Kegiatan kemahasiswaan berbasis budaya lokal.
3. Pelatihan karakter berlandaskan filosofi Masyarakat.
4. Diskusi lintas budaya tentang nilai antikorupsi.

implementasi pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal bukan hanya tentang mengenalkan budaya, tetapi juga membangun identitas moral mahasiswa dengan memanfaatkan kekuatan nilai tradisional yang telah teruji dalam kehidupan sosial masyarakat.

d. Peran Mahasiswan dan Perguruan Tinggi

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam gerakan antikorupsi karena mereka adalah kelompok kritis, memiliki keberanian moral, dan dekat dengan persoalan publik. Peran mahasiswa meliputi :

1. Pendidikan integritas diri, dengan menerapkan nilai antikorupsi dalam kehidupan akademik.

2. Gerakan sosial, melalui demonstrasi, kampanye, dan advokasi kebijakan
3. Pengawasan sosial (social control), misalnya mengawasi anggaran kampus atau kebijakan pemerintah.
4. Pengembangan literasi antikorupsi, melalui penulisan akademik, seminar, podcast, dan media sosial.
5. Kolaborasi dengan lembaga antikorupsi, termasuk KPK, LSM, dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, peran mahasiswa dan perguruan tinggi menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung gerakan antikorupsi nasional. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi penghasil lulusan berkompeten, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter yang memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan etika publik. Dalam konteks ini, mahasiswa berada pada posisi strategis karena mereka memiliki kapasitas intelektual untuk memahami persoalan korupsi secara kritis dan kemampuan sosial untuk menggalang dukungan publik melalui aktivitas kampus, organisasi kemahasiswaan, maupun penggunaan media digital. Buku Pendidikan Anti Korupsi Era 4.0 menegaskan bahwa mahasiswa merupakan kekuatan moral (moral force) yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat dan memantau jalannya pemerintahan melalui kontrol sosial yang konstruktif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda, terutama mahasiswa yang memegang peranan strategis sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan fenomena sosial, budaya, dan struktural yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari temuan dalam Jurnal Perkara yang menyatakan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kebiasaan hidup dan cara berpikir masyarakat, sehingga upaya pemberantasannya harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan menyentuh dimensi moral serta budaya. Untuk itu, pendidikan antikorupsi tidak dapat hanya fokus pada aspek legalistik, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan nilai, kesadaran kritis, dan perubahan perilaku.

Pendidikan antikorupsi dalam lingkungan perguruan tinggi menjadi pilar penting karena mahasiswa memiliki potensi besar untuk menyerap, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Perguruan tinggi harus berperan aktif sebagai institusi moral yang mampu menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari praktik-praktik tidak etis, seperti plagiarisme, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan kewenangan. Keteladanan dosen dan pimpinan kampus memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan karakter mahasiswa. Tanpa keteladanan tersebut, nilai antikorupsi sulit tertanam secara menyeluruh. Oleh karena itu, integritas harus menjadi budaya lembaga, bukan hanya pengetahuan yang diajarkan di kelas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi pendidikan integritas harus mencakup berbagai pendekatan yang sistematis, seperti integrasi kurikulum antikorupsi, pembiasaan perilaku jujur, penguatan literasi digital, dan mekanisme pengawasan lingkungan kampus. Pendekatan ini memperkuat kesadaran mahasiswa bahwa korupsi bukan sekadar tindakan kriminal, tetapi perbuatan yang mengancam keadilan sosial,

kesejahteraan bangsa, dan masa depan generasi mendatang. Namun, strategi tersebut tidak lepas dari tantangan yang kompleks, terutama budaya permisif terhadap korupsi, lemahnya moralitas aparatur publik, dan perkembangan teknologi digital yang memiliki sisi gelap seperti penyebaran hoaks dan manipulasi data. Tantangan ini mengharuskan penguatan pendidikan karakter dan literasi digital etis sehingga mahasiswa dapat lebih kritis dan bijak dalam menanggapi isu publik.

Selain pendekatan formal, penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi. Nilai Pi'il Pesenggiri pada masyarakat Lampung, seperti juluk adok, nemui nyimah, dan sakai sambaian, berfungsi sebagai landasan moral yang relevan untuk memperkuat nilai integritas pada generasi muda. Kearifan lokal memiliki kedekatan emosional dan historis bagi peserta didik, sehingga mampu memperkuat kesadaran moral mereka. Pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal tidak hanya mengenalkan budaya, tetapi juga menginternalisasikan rasa malu, kejujuran, harga diri, dan solidaritas sosial—nilai-nilai yang menjadi benteng utama terhadap perilaku koruptif. Dengan demikian, pendekatan budaya menjadi jembatan penting dalam menjadikan pendidikan antikorupsi lebih kontekstual, hidup, dan membumi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan upaya terpadu yang melibatkan pendidikan formal, nilai budaya, peran mahasiswa, serta komitmen institusi. Pendidikan antikorupsi harus bersifat holistik—menggabungkan aspek kognitif, afektif, moral, sosial, dan budaya. Perguruan tinggi sebagai pusat pembentukan intelektual bangsa harus menciptakan ekosistem akademik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sementara mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus terus didorong agar menjadi agen perubahan yang konsisten memperjuangkan nilai keadilan dan integritas.

Dengan adanya sinergi antara pendidikan antikorupsi, penguatan nilai kearifan lokal, komitmen institusi pendidikan, dan mobilisasi gerakan mahasiswa, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Upaya ini tidak hanya mendukung pemberantasan korupsi saat ini, tetapi juga memastikan terciptanya generasi masa depan yang berintegritas tinggi dan siap membangun bangsa menuju peradaban yang lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z., Wijaya, B., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. (2024). Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Perkara*.
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Universitas Bandar Lampung Press.
- Universitas Bandar Lampung. (tanpa tahun). Pendidikan Anti Korupsi BerkeArifan Lokal. Universitas Bandar Lampung Press.
- Muttaqin, T. (2018). "Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Gerakan Antikorupsi." *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 55-67.
- Kementerian Hukum dan HAM RI - BPHN. (2018). Kajian Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2019). Penguatan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan Tahunan KPK. Jakarta: KPK RI.
- Widoyoko, J. D. (2016). "Menimbang Peluang Gerakan Antikorupsi." *Jurnal Integritas*, 2(2), 155-170.
- Suyatno. (2019). "Internalisasi Integritas dalam Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(3), 311-322.